

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kebanyakan kasus, negara-negara berkembang menghadapi berbagai masalah ekonomi, termasuk kemiskinan, inflasi yang tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Kemiskinan telah menjadi masalah yang sangat umum di Indonesia dan di banyak negara berkembang lainnya, terutama di negara dengan populasi yang padat seperti Indonesia. Seringkali, tingkat kemiskinan suatu negara dapat digunakan untuk menilai kondisi perekonomian negara tersebut (Susanto & Pangesti, 2021).

Kemiskinan ialah salah satu masalah yang masih dihadapi oleh Indonesia. Untuk alasan ini, kemiskinan harus menjadi prioritas utama pembangunan karena merupakan masalah yang kompleks dan memiliki banyak aspek. Untuk mengakhiri kemiskinan, Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program. Ada dua pendekatan yang harus digunakan dalam upaya mengakhiri kemiskinan. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin dengan memenuhi kebutuhan mereka dalam berbagai hal. Kedua, memberikan pelatihan kepada mereka agar mereka dapat mencegah kemiskinan baru muncul. Untuk mencapai cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, pengentasan kemiskinan dilakukan (Ferezegia, 2018).

Pada dasarnya tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan menanggulangi pengurangan kemiskinan. Dalam setiap negara mempunyai kewajiban dalam menanggulangi adanya permasalahan kemiskinan yang bertujuan untuk mencapai suatu pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan hidup dari seluruh rakyat dalam suatu negara tersebut. Melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, pemerintah Indonesia membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatasi kemiskinan. Pada masa lalu, ada beberapa masalah dengan penerapan program penanggulangan kemiskinan. Proses pembuatan kebijakan yang efektif dan dapat dimulai dengan bukti seharusnya memperbaiki kelemahan ini. Menurut Laporan Pelaksanaan Tugas Sekretariat TNP2K 2015-2019, TNP2K telah mendukung usulan perubahan kebijakan dan

peningkatan kualitas implementasi program dengan memanfaatkan pengetahuan dan bukti (Lentari, 2024).

Kebijakan dan program pengentasan kemiskinan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini sila ke-5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu landasan hukum program pengentasan kemiskinan adalah BAB XIV tentang perekonomian Nasional dan Kesejahteraan sosial menurut “Pasal 33 dan 34 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. “Pasal 34 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” mengamanatkan bahwa Negara harus mengembangkan sistem jaminan sosial dan memberdayakan masyarakat rentan dan tidak mampu. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Negara mempunyai tanggung jawab terhadap rakyatnya dalam mendorong mereka mencapai kesejahteraan.

Di Jawa Timur, yang merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, isu kesejahteraan masyarakat masih menjadi tantangan utama, terutama di daerah pedesaan. Menurut Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2023, Angka kemiskinan di Jawa Timur menyentuh 10,35% dari total populasinya atau sebanyak 4,18 Juta Jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk terus melakukan berbagai inovasi dalam upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya di sektor ekonomi (Amelia et al., 2024).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, pada tahun 2023, tingkat kemiskinan di pedesaan Jawa Timur mencapai 14,54%, lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perkotaan yang berada di angka 6,94%. Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,79%, turun 0,56% dari Maret 2023. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 3,983 juta, turun 0,206 juta dari Maret 2023. Dibandingkan dengan Maret 2023, jumlah penduduk miskin perkotaan turun sebanyak 61 ribu orang (dari 1,704 juta orang pada Maret 2023 menjadi 1,643 juta orang pada Maret 2024), dan persentase penduduk miskin pedesaan turun sebesar 13,98 persen pada Maret 2023 menjadi 13,30 persen pada Maret 2024 (Statistik, 2024).

Dalam pedoman Anti Poverty Program merupakan langkah Pemerintahan Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan daya jangkau kelompok miskin yang bisa memanfaatkan program. Adapun perbedaan mendasar dari desain ulang pedoman umum APP yaitu penggunaan pendekatan ke perantara pasar yang dijelaskan sebagai sebuah pendekatan pengembangan UMK yang bertujuan menciptakan akses pasar baru atau memperkuat yang sudah ada dalam bentuk model bisnis diantara UMK, Mitra Lokal, dan Mitra Swasta yang mencakup transaksi jual beli, jasa, dan investasi, yang pada akhirnya menghasilkan kenaikan pendapatan bagi UMK dan kenaikan omzet serta keuntungan bagi para mitra.

Salah satu program inovatif yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah Program pemberdayaan ekonomi kolaboratif, inklusif, berkelanjutan, mandiri dan sejahtera (Peti Koin Bermantra). Program ini diluncurkan sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat ekonomi mikro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Peti Koin Bermantra berfokus pada pengumpulan dana berbasis komunitas melalui sistem tabungan mikro, di mana masyarakat secara kolektif menyumbangkan dana kecil yang nantinya dikelola untuk kegiatan produktif, seperti modal usaha kecil dan pelatihan kewirausahaan.

Peti Koin Bermantra merupakan pengembangan dan keberlanjutan dari Anti Poverty Program (APP) yang sudah berjalan selama 17 tahun di 17 Kabupaten lokasi APP di Jawa Timur. Anti Poverty Program atau biasa disingkat dengan APP merupakan bagian dari kebijakan penanganan penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur yang berbasis pemberdayaan usaha ekonomi produktif (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Timur, 2024).

Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menyadari pentingnya pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai inisiatif telah diluncurkan untuk mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM), termasuk penyediaan pelatihan, akses ke kredit, dan dukungan pemasaran. Dalam rangka meningkatkan upaya tersebut, Pemprov Jatim meluncurkan program "Peti Koin Bermantra". Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendekatan yang holistik, menggabungkan edukasi kewirausahaan, akses modal, dan dukungan komunitas. Nama "Peti Koin"

mencerminkan harapan untuk mengumpulkan potensi ekonomi masyarakat, sementara "Bermantra" melambangkan kekuatan dan keberanian untuk bermimpi dan berusaha.

Kabupaten Ponorogo menjadi salah satu daerah yang turut serta dalam program Peti Koin Bermantra yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai bagian dari upaya pemberdayaan kelompok masyarakat miskin. Proses keikutsertaan Kabupaten Ponorogo dalam program ini diawali dengan identifikasi dan pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat oleh Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo. Hasil pemetaan tersebut kemudian disampaikan kepada Pemerintah Provinsi sebagai dasar dalam mengusulkan Ponorogo sebagai salah satu penerima manfaat program.

Setelah disetujui, tahap selanjutnya adalah perencanaan teknis dan penyesuaian program dengan kebutuhan lokal, yang melibatkan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Ponorogo, perangkat desa, serta kelompok masyarakat sasaran. Implementasi program dilakukan melalui serangkaian kegiatan, seperti pelatihan keterampilan, fasilitasi akses permodalan, serta pendampingan bagi kelompok masyarakat miskin agar mereka dapat mengembangkan usaha ekonomi produktif secara mandiri.

Sebagai bentuk monitoring dan evaluasi, Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo bersama pihak terkait secara berkala melakukan peninjauan terhadap efektivitas program, memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan Ponorogo dalam menjalankan program Peti Koin Bermantra menjadi bukti komitmen daerah dalam mendukung kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Ekonomi Indonesia mengalami berbagai tantangan, termasuk ketimpangan ekonomi dan kemiskinan yang masih tinggi di beberapa daerah. Masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan daerah terpencil, sering kali memiliki keterbatasan akses terhadap modal, pendidikan, dan pasar. Hal ini menghambat potensi mereka untuk berwirausaha dan meningkatkan kualitas hidup. Pemberdayaan ekonomi menjadi krusial dalam menciptakan kemandirian masyarakat. Dengan memberikan akses pendidikan, pelatihan, dan modal usaha,

masyarakat dapat mengembangkan keterampilan dan meningkatkan pendapatan mereka. Program-program pemberdayaan ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi angka pengangguran.

Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan telah menjadi salah satu tujuan utama pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Pemberdayaan masyarakat menjadi strategi kunci dalam mencapai tujuan ini. Melalui pemberdayaan, masyarakat diharapkan mampu mengembangkan potensi yang mereka miliki, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun budaya, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan nasional, pemberdayaan masyarakat juga sejalan dengan upaya mencapai tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama dalam hal pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan.

Program PETI Koin Bermantra tidak hanya menawarkan solusi finansial bagi masyarakat miskin, tetapi juga mengedepankan pemberdayaan melalui peningkatan literasi keuangan dan keterampilan berwirausaha. Melalui pendekatan ini, program bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola keuangan secara lebih baik serta mendorong kemandirian ekonomi di tingkat. Dalam konteks ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM), koperasi, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM), untuk memastikan program ini berjalan efektif dan mencapai targetnya.

Namun, meskipun program ini telah menunjukkan dampak positif, beberapa tantangan masih dihadapi dalam pelaksanaannya. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi keuangan masyarakat, yang sering kali menghambat optimalisasi program pemberdayaan ini. Selain itu, akses terhadap teknologi dan informasi di pedesaan juga menjadi kendala dalam upaya peningkatan kapasitas masyarakat melalui program ini. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk menilai efektivitas Program Peti Koin Bermantra serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya di lapangan.

Program Peti Koin Bermantra merupakan sebuah inisiatif sosial yang bertujuan untuk memberikan bantuan finansial langsung kepada masyarakat kurang

mampu. Program ini diluncurkan sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat akan dukungan ekonomi, terutama di tengah kondisi perekonomian yang tidak menentu. Peti Koin Bermantra didesain untuk menjadi jaring pengaman sosial yang memungkinkan penerima manfaat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan.

Latar belakang program ini berakar dari komitmen pemerintah dan organisasi sosial untuk mengurangi tingkat kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai tantangan ekonomi, seperti kenaikan harga bahan pokok dan akses yang terbatas ke layanan dasar, telah memperburuk kondisi masyarakat miskin. Melalui program ini, diharapkan masyarakat dapat mengatasi kesulitan ekonomi sehari-hari dan memiliki peluang untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Peti Koin Bermantra juga dilengkapi dengan pendekatan yang inklusif, di mana tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga edukasi tentang pengelolaan keuangan sederhana bagi penerima manfaat. Ini bertujuan agar bantuan yang diberikan dapat digunakan secara efektif dan memberikan dampak jangka panjang. Dengan adanya program ini, masyarakat tidak hanya terbantu dalam jangka pendek, tetapi juga didorong untuk menjadi lebih mandiri dan berdaya dalam jangka panjang.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan dampak Program Peti Koin Bermantra dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur. Dengan melakukan kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan program, sehingga dapat menjadi acuan bagi pengembangan kebijakan pemberdayaan masyarakat di masa mendatang.

Pada penelitian ini, dijelaskan beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian saat ini. Dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut, akan disimpulkan mengenai perbedaan-perbedaan dengan penelitian sekarang tentang program atau upaya dalam penanggulangan kemiskinan. Penelitian yang pertama adalah penelitian dari Farida Rahmawati berdasarkan artikel yang berjudul “Anti Poverty Program Bidang Perikanan berbasis

Sustainable Development Goals untuk Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Tumpang”. Salah satu kebijakan yang dirancang untuk mempercepat penanganan kemiskinan di provinsi Jawa Timur adalah Anti Poverty Program (APP). Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli penduduk miskin melalui pemberdayaan usaha melalui pola kemitraan berbasis kluster. Untuk melaksanakan Anti Poverty Program (APP) di bidang perikanan, Kecamatan Tumpang, yang terletak di Kabupaten Malang, masih ada beberapa hambatan. Salah satunya adalah kurangnya dana untuk membeli alat seperti mesin. Pentingnya peran Konsultan Teknis Kecamatan dalam mendampingi dan membina Pokmas membuat evaluasi diperlukan untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan program atau hasilnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Program Anti Poverty (APP) Bidang Perikanan di Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Sustainable development goals adalah Sasaran pembangunan berkelanjutan rencana jangka panjang yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi dan untuk mengurangi kemiskinan di Kecamatan Tumpang. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif digunakan dalam artikel ini. Penelitian ini melibatkan karyawan bidang ekonomi dari BAPPEDA Kabupaten Malang, karyawan dari Dinas Perikanan Kabupaten Malang, konsultan teknis dari kecamatan Tumpang, pendamping kelompok masyarakat, dan anggota pokmas dari kecamatan Tumpang. Survey, observasi, dan dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk melakukan analisis data (Rahmawati et al., 2022).

Penelitian yang ke dua, Menurut Yuliana Windisari Artikel yang berjudul “Pemahaman Program Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur”. Program Jalin Matra, yang berarti Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera, adalah salah satu program pengentasan kemiskinan (APP) yang ditawarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Program ini dilaksanakan selama lima tahun dengan menggunakan rancangan dan pelaksanaan program yang terorganisir dengan memperhatikan ketepatan sasaran sebagai bagian dari program pengentasan kemiskinan. Negara bertanggung jawab untuk menjalankan program pengentasan kemiskinan bagi warganya. Program ini sering distigma sebagai program yang tidak

tepat sasaran, yang bertentangan dengan kenyataan bahwa program ini dirancang untuk mencapai tujuan tertentu (Windisari et al., 2024)

Penelitian yang ke tiga, Menurut Debrina Vita Ferezagia Artikel yang berjudul “*Evidence-Based Policy Making: Penggunaan Bukti Untuk Program Penanggulangan Kemiskinan Di Jawa Timur*”. Dalam artikel ini, kami menyelidiki penerapan kebijakan berdasarkan bukti dalam program penanggulangan kemiskinan di Indonesia, dengan penekanan khusus pada penggunaan bukti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bukti dapat digunakan untuk membuat kebijakan penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur. Studi ini menggunakan metode penelitian fenomenologi. Pertama, data berasal dari penelitian empiris, undang-undang, naskah akademik, dan pemberitaan media. Kedua, data berasal dari wawancara. Mereka yang diwawancarai termasuk pengambil kebijakan, praktisi, dan akademisi yang berkaitan dengan program anti kemiskinan (APP) sebagai salah satu kebijakan kemiskinan di Jawa Timur. Artikel menunjukkan bahwa jika pembuat kebijakan menerima data dan pedoman yang lebih akurat dan kuat tentang penanggulangan kemiskinan, mereka akan lebih mampu membuat keputusan yang lebih baik dan efisien tentang intervensi mana yang harus dilakukan dengan mentargetkan bidang tertentu. Namun, pakar juga berasumsi bahwa ketika Bappenas membuat kebijakan berdasarkan bukti penelitian, pemerintah daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi akan mengadopsi kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan keterbatasan teknis seperti keterbatasan anggaran (Lentari, 2024).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan evaluasi yang berdasarkan teori pemberdayaan. Dalam pendekatan ini, evaluasi kebijakan tidak hanya melihat hasil program atau kebijakan, tetapi juga mengaitkan hasil tersebut dengan teori-teori yang mendasari kebijakan tersebut. Hal ini berbeda dengan penelitian kebijakan terdahulu yang mungkin lebih berfokus pada evaluasi hasil semata, tanpa mengaitkannya secara eksplisit dengan teori kebijakan yang melandasi tindakan pemerintah. Selain itu tidak hanya efektivitas program atau kebijakan, tetapi juga keadilan, keefisienan, dan keberlanjutannya. Ini adalah sesuatu yang mungkin

diabaikan dalam banyak penelitian terdahulu yang hanya memusatkan perhatian pada satu dimensi, seperti efektivitas atau efisiensi saja.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Program Peti Koin Bermantra Melalui BAPPEDA LITBANG Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana Dampak Adanya Program Peti Koin Bermantra Terhadap Penerima Program ?
3. Apa Kekurangan dan Kelebihan Program Peti Koin Bermantra?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Memahami implementasi program Peti Koin Bermantra yang dilaksanakan melalui BAPPEDA LITBANG Kabupaten Ponorogo, termasuk mekanisme pelaksanaan, strategi, serta kendala yang dihadapi.
2. Memahami dampak program Peti Koin Bermantra terhadap penerima manfaat dan masyarakat yang terlibat.
3. Mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan Program Peti Koin Bermantra, serta memberikan rekomendasi untuk optimalisasi kebijakan di masa depan.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan pada penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak yang membaca, adapun manfaatnya sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam membantu Pemerintah Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Ponorogo karena keikutsertaan dalam Program Peti Koin Bermantra dan lembaga-lembaga terkait untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan kemiskinan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat membantu dalam memahami faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan program dan dengan demikian membantu dalam merancang program-program penanggulangan kemiskinan.

Secara keseluruhan, manfaat praktis Program Peti Koin Bermantra ini memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, serta menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan di Jawa Timur.

E. Penegasan Istilah

Beberapa istilah yang terkait dengan topik penelitian ini, meliputi :

1. Implementasi

Implementasi kebijakan merupakan bagian dari proses pembuatan kebijakan (*policy making process*). Seperti dinyatakan Hasbullah (2015), bahwa proses pembuatan kebijakan merupakan proses politik yang berlangsung dalam tahap-tahap pembuatan kebijakan politik, dimana aktivitas politis ini dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan, dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung satu sama lainnya, diatur menurut urutan waktu, seperti penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan (Asiva Noor Rachmayani, 2015).

2. Peti Koin Bermantra

Peti Koin Bermantra merupakan desain ulang dari Anti Poverty Program (APP) dan terintegrasi menjadi bagian dari program penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur berbasis pemberdayaan usaha ekonomi produktif melalui pendekatan keperantaraan pasar. Program Peti Koin Bermantra, atau Pemberdayaan Ekonomi Kolaborasi Inklusif Berkelanjutan, Mandiri, dan Sejahtera, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komunitas lokal. Fokus utama program ini adalah menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan mandiri, serta memberdayakan kelompok rentan, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat pedesaan.

3. Bappeda

BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) adalah instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan di tingkat regional, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Tugas utama BAPPEDA adalah merumuskan kebijakan dan rencana pembangunan jangka pendek,

menengah, dan panjang yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Sebagai bagian dari pemerintah daerah, BAPPEDA juga berperan dalam mengoordinasikan program-program pembangunan lintas sektor, memantau serta mengevaluasi pelaksanaan pembangunan, dan memastikan bahwa kebijakan pembangunan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.

4. Kelompok Masyarakat Miskin

Sekelompok individu atau keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kelompok ini seringkali memiliki akses yang terbatas terhadap peluang ekonomi, pendidikan, dan layanan sosial, yang memperburuk siklus kemiskinan yang mereka alami. Penegakan ini bertujuan untuk menyoroti kondisi sosio-ekonomi mereka yang membutuhkan perhatian khusus dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan.

F. Landasan Teori

Teori Pemberdayaan

Pemberdayaan (*empowerment*) adalah sebuah konsep yang semakin penting dalam konteks pembangunan sosial dan ekonomi, khususnya dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Teori pemberdayaan terbaru memandang bahwa pemberdayaan adalah proses multidimensi yang berfokus pada peningkatan kemampuan individu atau kelompok untuk membuat keputusan yang bermakna dalam hidup mereka dan untuk memengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan mereka. Pemberdayaan berakar pada berbagai pendekatan, termasuk teori partisipatif, teori transformasional, dan pendekatan berbasis sumber daya.

Beberapa elemen kunci dari teori pemberdayaan yang dapat menjadi landasan dalam konteks pemberdayaan masyarakat miskin adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Sebagai Proses dan Hasil

Menurut teori *empowerment*, pemberdayaan bukan hanya hasil akhir, tetapi juga sebuah proses di mana individu atau kelompok memperoleh kemampuan untuk mengontrol sumber daya dan membuat keputusan yang sebelumnya tidak dapat mereka akses. Proses ini mencakup peningkatan kapasitas, akses terhadap sumber

daya, dan pengembangan kesadaran kritis. Pemberdayaan sebagai hasil tercermin dalam peningkatan kesejahteraan, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis.

2. Dimensi Pemberdayaan

Teori terbaru juga melihat pemberdayaan melalui beberapa dimensi, seperti yang dijelaskan oleh Naila Kabeer (2019) dan Amartya Sen:

Sumber Daya: Merujuk pada akses terhadap aset material, keterampilan, informasi, dan jaringan sosial yang memungkinkan individu untuk meningkatkan posisi sosial dan ekonomi mereka.

Agen (Agency): Kemampuan untuk bertindak, membuat pilihan, dan mempengaruhi keputusan yang penting bagi kehidupan individu. Ini mencakup aspek kemandirian dan partisipasi aktif dalam komunitas.

Capaian (Achievements): Pencapaian yang diperoleh dari interaksi antara sumber daya dan agen, seperti peningkatan pendapatan, pendidikan, kesehatan, atau kemandirian ekonomi.

3. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi adalah dimensi penting dalam mengentaskan kemiskinan. Menurut Sen (1999) dan Kabeer (2019), pemberdayaan ekonomi berfokus pada peningkatan akses masyarakat miskin terhadap sumber daya produktif, seperti modal, teknologi, dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam ekonomi. Program pemberdayaan yang berhasil harus mampu meningkatkan kapasitas kewirausahaan, akses pasar, dan dukungan modal untuk kelompok masyarakat miskin.

4. Pemberdayaan Komunitas

Dalam konteks kelompok masyarakat miskin, pemberdayaan komunitas memainkan peran penting dalam mendorong kekuatan kolektif. Pemberdayaan komunitas mencakup keterlibatan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, penguatan ikatan sosial, serta peningkatan modal sosial yang memungkinkan masyarakat miskin bekerja bersama untuk mencapai tujuan Bersama.

5. Model Pemberdayaan Partisipatif

Pemberdayaan partisipatif merupakan model yang berfokus pada pelibatan langsung masyarakat miskin dalam setiap tahap pengambilan keputusan, dari

perencanaan hingga evaluasi. Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap program yang diterapkan, tetapi juga memastikan bahwa solusi yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan konteks local.

G. Definisi Operasional

Untuk mendukung penelitian ini, beberapa istilah kunci perlu didefinisikan secara operasional agar jelas bagaimana variabel-variabel yang ada akan diukur dalam penelitian.

1. Pemberdayaan sebagai proses dan hasil, dimana dalam hal ini mencakup Program Peti Koin Bermantra yang merupakan sebuah inisiatif yang dirancang oleh BAPPEDA Litbang Kabupaten Ponorogo untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat miskin melalui bantuan modal, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan usaha. Program ini diukur melalui jumlah penerima manfaat, jenis intervensi yang diberikan (pelatihan, modal usaha, dll.), dan hasil yang dicapai oleh peserta (peningkatan pendapatan, pembukaan usaha baru, dll.).
2. Dimensi pemberdayaan mencakup Kelompok Masyarakat Miskin, yang menjadi sasaran program adalah masyarakat yang secara ekonomi masuk dalam kategori miskin berdasarkan kriteria yang digunakan oleh BAPPEDA Litbang Kabupaten Ponorogo, seperti pendapatan di bawah garis kemiskinan, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta minimnya aset produktif. Dalam penelitian ini, kelompok masyarakat miskin didefinisikan berdasarkan data resmi pemerintah dan observasi lapangan.
3. Pemberdayaan ekonomi yang dimaksudkan adalah Pelatihan Kewirausahaan, yang mencakup program peningkatan keterampilan yang diberikan kepada kelompok masyarakat miskin untuk membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan dalam memulai dan mengelola usaha kecil. Keberhasilan pelatihan ini diukur dari tingkat penerapan keterampilan dalam usaha yang dirintis, peningkatan pengetahuan kewirausahaan, dan jumlah usaha yang dibentuk oleh peserta pelatihan.
4. Pemberdayaan komunitas mencakup Pendampingan Usaha, yang merupakan bentuk dukungan yang diberikan kepada kelompok masyarakat

miskin dalam menjalankan dan mengembangkan usaha yang telah didirikan. Pendampingan ini meliputi bimbingan teknis, akses pasar, dan konsultasi bisnis. Keberhasilan pendampingan usaha diukur dari keberlanjutan usaha peserta program, peningkatan omset usaha, dan kepuasan peserta terhadap pendampingan.

5. Model pemberdayaan partisipatif yang melibatkan Ppartisipasi Masyarakat, yaitu keterlibatan aktif kelompok masyarakat miskin dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Program Peti Koin Bermantra. Partisipasi ini diukur melalui frekuensi kehadiran dalam pertemuan, kontribusi dalam pengambilan keputusan, dan tingkat kepuasan terhadap hasil program.

Landasan teori pemberdayaan terbaru menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai proses dan hasil yang melibatkan akses terhadap sumber daya, penguatan kapasitas agen individu atau kelompok, serta pencapaian perubahan nyata dalam kehidupan mereka. Dalam konteks Program Peti Koin Bermantra, pemberdayaan masyarakat miskin dapat diwujudkan melalui akses modal, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan usaha yang berkelanjutan. Definisi operasional yang disusun di atas membantu mengklarifikasi pengukuran variabel-variabel kunci dalam penelitian ini, sehingga dapat dievaluasi efektivitas implementasi program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh BAPPEDA Litbang Kabupaten Ponorogo.

Teori Pemberdayaan cocok digunakan dalam penelitian ini karena teori ini memberikan kerangka yang komprehensif untuk memahami bagaimana kelompok masyarakat miskin dapat memperoleh akses terhadap sumber daya, kemampuan untuk membuat keputusan, dan hasil yang signifikan bagi kehidupan mereka. Program Peti Koin Bermantra yang bertujuan memberdayakan masyarakat miskin melalui peningkatan ekonomi, partisipasi aktif, dan transformasi komunitas sesuai dengan elemen-elemen kunci dari teori Pemberdayaan. Dengan menggunakan teori ini, penelitian dapat menganalisis secara mendalam bagaimana proses pemberdayaan terjadi, hambatan apa yang dihadapi, dan hasil apa yang dicapai dari implementasi program tersebut.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan jenis kualitatif dengan metode wawancara dan observasi secara langsung. Penelitian kualitatif jenis penelitian dengan mengutamakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat tepatnya dengan data yang berupa data deskriptif. Pada penelitian ini mendeskripsikan kejadian yang di dengar, dirasakan dan dibuat dalam pernyataan naratif atau deskriptif (Strauss, 2002). Pendekatan penelitian kualitatif memberikan pemahaman yang mendalam, kompleks, dan kontekstual tentang fenomena sosial, budaya, dan perilaku manusia. Pendekatan ini sangat berguna dalam mengeksplorasi topik-topik yang belum banyak diketahui atau membutuhkan pemahaman yang lebih dalam dari perspektif partisipan atau subjek penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di BAPPEDA LITBANG Kabupaten Ponorogo dan 7 Desa di kabupaten Ponorogo yaitu Desa Wates Kec. Jenangan, Desa Nambak Kec. Bungkal, Desa Duri Kec. Slahung, Desa Watu Bonang Kec. Badegan, Desa Talun Kec. Ngebel, Desa Bringinan Kec. Jambon, Desa Sumberejo Kec. Balong. Lokasi tersebut dipilih untuk memperoleh informasi yang valid dan akurat yang akan digunakan untuk melakukan observasi.

3. Informan/Subjek Penelitian

Pada penelitian ini yang akan menjadi subjek penelitian adalah BAPPEDA Kabupaten Ponorogo. BAPPEDA Kabupaten Ponorogo tersebut ditetapkan sebagai subjek dan informan dalam penelitian ini. Teknik penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, informan ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Proses pengumpulan data berlangsung terus menerus hingga data tercukupi. Selain itu menggunakan dokumentasi sebagai alat untuk mendukung validasi dan memastikan keberlanjutan program ini. Penelitian ini menggunakan *Purposive sampling* dalam penentuan informan, dimana peneliti memilih dan menentukan berdasarkan karaktersitik yang relevan dengan tujuan penelitian, antara lain :

- Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo

Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo berperan sebagai perencana, pengarah, dan pengawas dalam implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif Inklusif Berkelanjutan Mandiri dan Sejahtera (Peti Koin Bermantra). Sebagai informan, mereka memberikan wawasan mengenai kebijakan, strategi, serta evaluasi program yang dijalankan untuk memastikan kesesuaiannya dengan visi pembangunan daerah. Selain itu, Bappeda Litbang juga berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan program berjalan efektif dan mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.

- Fasilitator Program Peti Koin Bermantra

Fasilitator dalam program Peti Koin Bermantra memiliki tugas utama sebagai jembatan antara pemerintah daerah dan masyarakat penerima manfaat. Mereka bertanggung jawab dalam memberikan pendampingan, pelatihan, serta edukasi kepada kelompok sasaran agar dapat mengoptimalkan bantuan yang diterima. Selain itu, fasilitator juga berperan dalam membangun kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan, pelaku usaha, serta komunitas lokal, guna menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih mandiri dan berdaya saing.

- Kelompok Penerima Program Peti Koin Bermantra

Sebagai pihak yang menjadi sasaran utama, penerima Program Peti Koin Bermantra berperan dalam mengaplikasikan bantuan dan pendampingan yang telah diberikan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mereka. Penerima program, yang terdiri dari kelompok masyarakat kurang mampu, UMKM, serta komunitas ekonomi lokal, diharapkan dapat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka. Dengan adanya program ini, penerima manfaat tidak hanya mendapatkan bantuan ekonomi, tetapi juga didorong untuk berkontribusi dalam membangun ekonomi inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Ponorogo.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data yang akurat, informasi, dan keterangan yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung ke lokasi. Teknik pengumpulan data tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan tetap mengacu pada pertanyaan wawancara akan tetapi pertanyaan-pertanyaannya bisa keluar dari instrumen pertanyaan yang telah dibuat. Kelebihan dari jenis wawancara ini lebih mendalam dan data yang diperoleh lebih lengkap.

b. Dokumentasi

Menurut Abdussamad (2021: 149), "dokumentasi adalah catatan mengenai peristiwa yang telah terjadi." Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya seseorang, seperti yang dikutip oleh Abdussamad (2021: 149), menyatakan bahwa dokumentasi adalah upaya mencari data terkait hal-hal atau variabel dalam bentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, ledger, agenda, dan sebagainya.

c. Observasi

Menurut Abdussamad (2021: 147), observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sengaja. Ini berarti peneliti ikut terlibat dalam aktivitas sehari-hari individu yang diamati atau yang menjadi sumber informasi dalam penelitian.

5. Analisis Data

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian dengan metode deskriptif Kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Analisa deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi (Sukardi et al., 2023).

Menurut (Miles et al., 2014) terdapat empat langkah-langkah dalam analisis data kualitatif yaitu pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), kesimpulan/verifikasi (*conclusion/verifying*).

a. Pengumpulan data (*data collection*)

Pengumpulan data adalah pendekatan metodis untuk mengumpulkan informasi yang relevan dari berbagai sumber, seperti survei, wawancara, observasi, dan eksperimen. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data yang akurat dan representatif yang dapat digunakan sebagai dasar analisis. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis data, yang melibatkan berbagai teknik untuk mengatur dan menganalisis informasi yang telah terkumpul. Teknik analisis data dapat mencakup metode statistik, analisis kualitatif, atau penggunaan alat khusus yang memungkinkan peneliti mengidentifikasi tren, pola, dan hubungan dalam data. Proses ini penting untuk memvalidasi hipotesis, menjawab pertanyaan penelitian, dan menciptakan hasil yang kredibel. Menggabungkan pengumpulan data sistematis yang efektif dengan analisis data yang tepat waktu memungkinkan peneliti memberikan hasil yang bermakna.

b. Kondensasi data (data condensation)

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya. Tahap ini peneliti melakukan pengumpulan dari data-data wawancara yang telah dilakukan sehingga data yang diperoleh benar-benar dapat terfokus sesuai dengan tingkat kebutuhan dalam penelitian. Melakukan wawancara untuk mendapatkan data yang sesuai dengan topik penelitian

c. Penyajian data (data display)

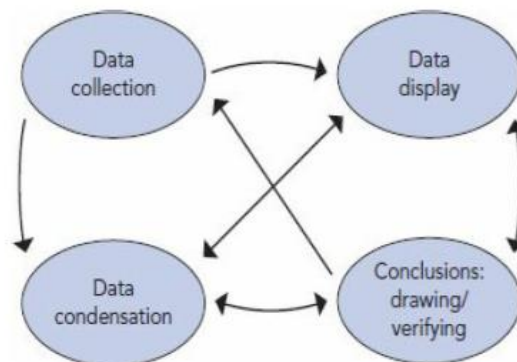
Penyajian data adalah proses di mana hasil pengumpulan dan analisis data disortir dan disajikan dengan cara yang mudah dipahami dan ditafsirkan. Tujuan penyajian data adalah untuk menyampaikan kepada pembaca hasil analisis yang jelas dan efektif. Teknik visualisasi data meliputi penggunaan tabel, grafik, diagram, dan alat bantu visual lainnya untuk membantu menjelaskan hubungan antara variabel seperti pola, tren, dan hubungan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dapat melibatkan narasi, kutipan, atau pemetaan konsep yang menggambarkan fokus utama dan tema yang muncul. Memanfaatkan alat bantu visual seperti infografis atau dasbor interaktif juga menjadi semakin umum dalam

mengatur data yang kompleks dengan cara yang dapat dipahami dan menarik secara visual.

d. Kesimpulan/verifikasi (conclusion/verifying)

Kesimpulan, yang juga dikenal sebagai verifikasi, merupakan tahap terakhir dari proses analisis data, yang bertujuan untuk mengonfirmasi validitas dan reliabilitas temuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti mensintesis data yang dianalisis sebelumnya untuk mengidentifikasi temuan yang signifikan dan menjawab pertanyaan penelitian. Verifikasi data melibatkan peninjauan dan evaluasi ulang data untuk memastikan konsistensi dan akurasi serta mengidentifikasi potensi bias atau kesalahan. Teknik seperti triangulasi, enumerasi anggota, dan validasi eksternal sering digunakan untuk meningkatkan kepercayaan. Hasil yang diperoleh harus didasarkan pada fondasi yang kuat dan memerlukan analisis yang menyeluruh dan objektif. Selain itu, peneliti juga perlu membangun hubungan antara temuan mereka dan teori yang diterapkan serta memperkuat implikasi praktis dan teoritis dari penelitian mereka. Ini berarti bahwa kontrol kualitas dan verifikasi membantu memastikan bahwa temuan penelitian dapat diverifikasi secara independen dan memberikan kontribusi yang berharga bagi pengetahuan dan praktik di bidang yang bersangkutan.

Gambar 1.1 Analisis Data Miles M B



Sumber : (Miles.M B, 2014)

I. Keabsahan Data

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan hasil penelitian yang sempurna perlu adanya keabsahan data. Oleh karena itu, teknik yang digunakan oleh peneliti untuk memastikan keabsahan data adalah triangulasi data. triangulasi adalah metode yang memperkuat validitas data dengan cara mengumpulkan data dari sumber yang berbeda, seperti wawancara dengan pengguna, observasi langsung (Liang & Irawan, 2023).

Menurut Norman K. Denzin (1978), Metode triangulasi adalah penggabungan atau kombinasi berbagai metode yang digunakan untuk menyelidiki fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Terdapat empat aspek yang termasuk dalam triangulasi, yaitu triangulasi metodologi, triangulasi antar peneliti, triangulasi sumber data, dan triangulasi teori. Dalam penelitian ini sendiri peneliti menggunakan triangulasi metodologi. Dalam penelitian ini sendiri peneliti menggunakan triangulasi metodologi.

Triangulasi metodologi dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan beberapa metode. Dalam penelitian kualitatif menggunakan metode seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk memperoleh data yang objektif dan tidak ambigu mengenai suatu topik tertentu, dapat menggunakan observasi dan wawancara untuk memverifikasi data. Selain itu, dapat menggunakan beberapa jenis informasi untuk menilai keabsahan data yang diberikan. metodologi triangulasi ini diterapkan ketika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian dianalisis untuk mengetahui keabsahannya. Triangulasi metodologi digunakan untuk men-triangulasi metode yang sama dalam situasi yang berbeda, dan men-triangulasi metode yang berbeda untuk menghubungkan objek yang sama (Zamili, 2015).